

# BIROKRASI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

*Agung Eko Purwana\**

**Abstract:** *In economic activities, the government has a very important role in allocating and distributing economic resources for the greatest prosperity of its people. In addition, the government also has a role as a tool for economic stabilization. But, these roles of government is not functionless properly. One of the reasons is the corrupt practices of bureaucracy. The scholars do a lot of studies about how to make the bureaucracy work unimpeded by corrupt practices. The same study is done by Muslim scholars and economists. They offer new alternatives based on Islamic law and Shari'ah. Shari'ah demanded to its adherents to act professionally in the process displaying neatness, correctness, order, and regularity. From this point of view, the paper would examine how Islamic economic perspective has a study on the duties of a government, especially in carrying out its functions, namely: allocation, distribution, and stabilization.*

**Keywords:** *Pelanggaran, Peraturan, Penegakan, Penghargaan.*

## PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan modern saat ini, birokrasi sangat dibutuhkan untuk membantu dalam memudahkan dan melancarkan tugas-tugas pemerintahan. Dalam kegiatan perekonomian, pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Selain itu pemerintah juga mempunyai peranan sebagai alat untuk stabilisasi perekonomian.

---

\* Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo

Ketiga peranan pemerintahan tersebut harus dapat difungsikan dengan baik, meskipun pada kenyataannya tidaklah mudah mewujudkannya. Pertumbuhan ekonomi belum berjalan lancar, meningkatnya jumlah pengangguran, ketimpangan pembangunan daerah kota dan desa, dan banyaknya masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan adalah bukti belum berhasilnya tugas yang harus diperankan oleh pemerintah. Salah satu sebab terhalangnya pemerintah dalam melakukan perannya adalah belum bersihnya birokrasi dari praktek-praktek korupsi.

Adanya korupsi dan kolusi yang kini telah terlanjur dipraktekkan secara luas tersebut, secara tidak langsung mengungkapkan adanya sesuatu yang salah dalam struktur pengawasan sosial dan politik negeri ini. Artinya, sebagaimana terjadi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan, walaupun lembaga-lembaga pengawasan fungsional telah dibangun secara berlapis-lapis, namun lembaga-lembaga itu pada umumnya tidak mampu mngemban fungsinya dengan baik. Karena itu tidak mengherankan, ketika Prof. Sumitro Djojohadikusumo menengarai bahwa tingkat kebocoran anggaran pembangunan sudah mencapai angka 30 %, namun yang berhasil diungkapkan BPKP tidak lebih dari sekitar 3 % saja.<sup>1</sup>

Fenomena korupsi dalam birokrasi ini membawa pada upaya secara terus-menerus untuk melakukan perbaikan (reformasi) dalam setiap level birokrasi. Masyarakat yang paling dirugikan dalam praktek korupsi ini menyadari bahwa

---

<sup>1</sup> Revrisond Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan IDEA, 1997), 124 - 125.

berlarut-larutnya masalah ini tidak membawa kepada tujuan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Tetapi masyarakat menyadari pula bahwa untuk menghilangkan korupsi dalam birokrasi ini tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Maka mulailah diadakan kajian-kajian tentang bagaimana melakukan pembangunan yang berhasil tanpa dihalangi oleh praktek korupsi.

Para pakar ekonomi pembangunan menawarkan sebuah konsep yang dikenal dengan istilah *Good Governance*. Gagasan ini memberikan syarat agar pembangunan dapat berhasil yakni mengharuskan adanya hubungan yang harmonis antara negara (*state*), masyarakat sipil (*civil society*), dan pasar (*market*). Dari konsep ini, birokrasi mempunyai peranan yang strategis dalam mengharmoniskan hubungan ketiga elemen tersebut. Oleh karena itu profesionalisme sumberdaya birokrasi menjadi perhatian utama dalam menentukan terwujudnya *good governance* dalam gagasan ini.<sup>2</sup>

Dalam pandangan teori pembangunan, menurut Adil Khan dan Meier yang dikutip oleh Moeljarto Tjokrowinoto dinyatakan bahwa *good governance* merupakan cara mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan, dan administrasinya bisa dipertanggungjawabkan pada publik.<sup>3</sup> Dari definisi ini, sekurang-kurangnya terdapat dua kompetensi yang harus dimiliki oleh birokrasi, yakni : birokrasi haruslah mampu memberikan pelayanan publik dengan adil dan inklusif sebaik-baiknya dan mampu

---

<sup>2</sup> Ibid., 3.

<sup>3</sup> Ibid., 10-11.

memberdayakan masyarakat sipil. Kompetensi pertama mengharuskan birokrasi untuk mampu memahami dan mengartikulasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dan sekaligus merumuskannya dalam kebijakan dan perencanaan serta mengimplementasikannya. Kompetensi kedua mengharuskan birokrasi untuk mengubah pola *top down* selama ini menjadi hubungan yang horizontal (*leveling – of*).

Dalam perkembangannya, gagasan *good governance* ini mendapat kritikan yang cukup tajam. Gagasan ini ternyata lebih mengedepankan paradigma pasar untuk melakukan perubahan terhadap paradigma administrasi publik yang selama ini dijalankan. Padahal logika pasar selama ini tidak melakukan pembelaan terhadap masyarakat yang tergolong lemah bahkan cenderung menjadi golongan yang tertindas. Rakyat yang lemah tidak akan mampu berhadapan dengan logika pasar dengan kuantifikasi modal. Maka tidak heran jika kemudian gagasan *good governance* ini disebut sebagai ide kapitalisme dengan wajahnya yang baru.<sup>4</sup>

Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang pada saat ini mengalami banyak kegagalan akibat mengadopsi gagasan yang berasal dari ide kapitalisme ini.<sup>5</sup> Oleh karena itu mereka mulai berhati-hati untuk tidak melakukan sepenuhnya ide yang muncul dari sistem kapitalisme ini. Di tengah kegagalan sistem kapitalisme dunia ini, muncullah sebuah alternatif sistem ekonomi yang berbasiskan pada nilai-nilai ajaran syariah Islam. Pada saat

---

<sup>4</sup> Ibid., x-xi.

<sup>5</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), 6.

krisis moneter yang melanda banyak negara, lembaga-lembaga ekonomi yang menerapkan mekanisme syariah terbukti dapat bertahan dan bahkan sebagiannya mampu untuk dapat tumbuh dan berkembang.<sup>6</sup>

Dalam teori-teori ekonomi, nilai-nilai yang ditawarkan ekonomi Islam tergolong hal yang baru. Meskipun pada kenyataannya ajaran Islam memberikan petunjuk-petunjuknya dalam beraktivitas ekonomi tetapi secara bangunan ilmu masih membutuhkan proses untuk menjadi mapan. Termasuk dalam hal ini adalah cabang-cabang dari ilmu ekonomi sendiri, yang pada perkembangan berikutnya juga muncul sebagai alternatif dan menjadi bagian dari ekonomi Islam. Muncul dan berkembangnya ilmu ekonomi Islam ini, turut memberikan alternatif pemecahan masalah yang berlarut-larut akibat dari mengusung gagasan kapitalisme yang mengalami kegagalan. Di sisi lain ajaran syariah Islam memang menuntut para pemeluknya untuk berlaku secara professional yang dalam prosesnya menampilkan kerapian, kebenaran, ketertiban, dan keteraturan.<sup>7</sup>

Seiring dengan permasalahan pembangunan yang belum menunjukkan hasil yang optimal sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, maka terdapat hal yang perlu mendapatkan jawaban tentang bagaimana ekonomi Islam memberikan alternatif dalam memecahkan persoalan-persoalan yang menjadi tugas yang harus diperankan oleh

---

<sup>6</sup> M. Lutfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2003), 47.

<sup>7</sup> Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek* (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), 1.

pemerintah. Oleh karenanya, penulis bermaksud mengkaji perspektif ekonomi Islam tentang birokrasi pemerintahan. Tulisan ini diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan birokrasi terutama yang berkaitan dengan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

### **NILAI-NILAI DASAR EKONOMI ISLAM**

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kegiatan ekonomi Islam sebagai madhhab ekonomi tersendiri memiliki pengertian yang berbeda dengan madhhab ekonomi yang sebelumnya. Berikut ini beberapa pendapat tentang pengertian ekonomi Islam :<sup>8</sup>

1. Islam yang di dalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditunjukkan oleh madzab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah umat manusia.
2. Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Quran dan as-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya

---

<sup>8</sup> Ibid., 17.

3. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam

Pengertian di atas memberikan perbedaan yang besar dengan madzab ekonomi sebelumnya. Adapun yang menjadi ciri-ciri dan nilai-nilai dasarnya adalah :<sup>9</sup>

1. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam secara keseluruhannya. Islam adalah agama yang multi komplit, multi faktual, dan multi dimensi dalam memenuhi kehidupan makhlukNya. Termasuk di dalamnya adalah kehidupan berekonomi. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan semua agama. Islam memiliki kekuatan hukum, perundang-undangan, tatakrama, dan tingkah laku. Oleh karena itu sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisah-pisahkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya.<sup>10</sup>
2. Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian. Pekerjaan apapun yang dilakukan oleh muslim, baik itu pekerjaan ekonomi ataupun bukan bisa berubah dari pekerjaan material biasa menjadi ibadah yang berpahala apabila orang muslim tadi dalam pekerjaannya bermaksud mencari keridhoan Allah Swt.
3. Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat luhur. Kedua madhhab ekonomi menjadikan materialisme sebagai orientasinya, sehingga mereka saling bertengkar untuk

---

<sup>9</sup> Ibid., 21 - 37.

<sup>10</sup> Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, terj. Achmad Rais (Jakarta : Gema Insani Press, 1991), 15.

bersaing, memonopoli pasar-pasar dan sumber-sumber bahan baku. Persaingan ini memunculkan perang dunia baik yang pertama maupun yang kedua, bahkan memicu untuk terjadinya perang dunia ketiga atau perang nuklir antara blok Kapitalisme dan sosialisme. Madhhab ekonomi Islam dalam setiap aspek kegiatan ekonominya selalu mengedepankan kerjasama dan bagi hasil sehingga yang terjadi adalah sifat luhur saling tolong-menolong.

4. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama. Penyelewengan kegiatan ekonomi oleh sebagian pelaku ekonomi dikarenakan lemahnya pengawasan yang hanya mengandalkan kontrol negara. Dalam lingkungan ekonomi Islam ditanamkan pengawasan hati nurani yang terbina atas keyakinan akan adanya Allah Swt dan perhitungan hari akhir. Seorang muslim akan merasa tidak mampu lepas dari pengawasan Allah Swt meskipun ia bisa lepas dari pengawasan kekuasaan manusia. Pengawasan dalam bentuk seperti inilah yang menjamin keselamatan tingkah laku masyarakat dan menghilangkan penyelewengan-penyelewengan kegiatan ekonomi. Yang menjadi dasar dari perkembangan masyarakat dalam Islam ialah bahwa masyarakat itu tidak dapat diubah dengan hanya memasukkan sejumlah aturan dari luar. Sebaliknya, kita hendaklah memberikan tekanan yang jauh lebih besar atas perbaikan moral yang benar ke dalam diri manusia

demikian rupa sehingga kejahatan dapat dikekang sampai ke akar-akarnya dalam hati manusia.<sup>11</sup>

5. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Cita-cita luhur ekonomi Islam adalah melaksanakan misi sebagai khilafah di bumi dengan tugas memakmurkannya. Seorang muslim akan mempertanggung jawabkan kewajibannya ini di hadapan Allah Swt. Keuntungan material yang dicapai dalam kegiatan ekonomi bagi seorang muslim adalah menjadi tujuan perantara untuk meraih cita-cita insani berupa kepatuhan kepada Allah swt. Dengan kata lain cita-cita ekonomi Islam bukanlah menciptakan persaingan, monopoli, atau mementingkan diri sendiri dengan mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, sebagaimana yang terjadi pada sistem ekonomi penemuan manusia. Cita-cita ekonomi Islam merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan hidup bagi seluruh masyarakat disertai niat melaksanakan hak khilafah dan mematuhi perintah Allah Swt.

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagaimana yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa terdapat keterpaduan antara unsur materi dan spiritual, unsur keduniaan dan keakhiratan, dan unsur individu dan masyarakat. Keseimbangan unsur-unsur ini akan berdampak pada

---

<sup>11</sup> Abul A'la Al Maududi, *Masalah Ekonomi dan Pemecahannya Menurut Islam*, terj. Adnam Syamni (Jakarta : Media Dakwah, 1985), 43.

keberhasilan dan kesuksesan seseorang dan masyarakat dalam mencapai cita-citanya.

## **PERAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN NORMA DAN ETIKA EKONOMI ISLAM**

Keunggulan ekonomi Islam bila dibandingkan dengan mazhab ekonomi kapitalis dan sosialis adalah adanya perpaduan antara etika dan kegiatan ekonomi. Etika Islam memberikan nilai tambah pada sistem ekonomi Islam. Etika ini pula yang mengisi kekosongan pemikiran yang ditakutkan bila terdapat kemajuan yang pesat dalam teknologi.

Peran pemerintah diperlukan dalam instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai sistem ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan maupun pengawasannya dalam pengalokasian atau distribusi sumber-sumber maupun dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan, serta pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi. Semua campur tangan negara ini harus menghasilkan individu dan masyarakat yang sholeh, saling mengasih sayangi, dan bekerjasama dalam kebaikan serta takwa kepada Allah swt.<sup>12</sup>

Prinsip sekularisme dengan memisahkan etika dan kegiatan ekonomi yang dianut Blok Barat maupun Timur terbukti tidak memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karenanya para pakar ekonomi Barat memuji dan mengakui keunggulan ini dibanding madhhab ekonomi yang dianutnya. Jack Austri, seorang Perancis dalam bukunya *Islam dan Pengembangan Ekonomi* mengatakan bahwa : " Islam

---

<sup>12</sup>Ahmad M. Saepudin, *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta : CV. Samudra, 1984), 36.

adalah gabungan antara tatanan kehidupan praktis dan sumber etika yang mulia. Antara keduanya terdapat ikatan sangat erat yang tidak terpisahkan". Dari sini bisa dikatakan bahwa orang-orang Islam tidak akan menerima ekonomi kapitalis. Dan ekonomi yang kekuatannya berdasarkan wahyu dari langit itu tanpa diragukan lagi adalah ekonomi berdasarkan etika.

Menurut J. Perth, kombinasi antara ekonomi dan etika ini bukan hal baru di dalam Islam. Sejak semula Islam tidak mengenal pemisahan jasmani dan rokhani. Prinsip sekularisme yang dilahirkan kaum protestan dengan renaisansnya di Eropa tidak dikenal dalam sejarah Islam. Sebab keuniversalan syariat Islam melarang berkembangnya ekonomi tanpa etika.<sup>13</sup>

Pemerintah mempunyai peranan yang besar dalam membina dan menjaga keberlangsungan perpaduan etika dan ekonomi ini. Hal inilah yang membedakan dengan pemerintahan yang menerapkan kapitalis dan sosialis dalam madhhab ekonominya. Ajaran Islam sebagai norma dasar dari ekonomi Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dan etika, ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika, agama dan negara, materi dan spiritual, sebagaimana yang ada pada madhhab dan sistem ekonomi lainnya. Oleh karenanya pemerintah perlu membuat langkah-langkah yang menuju ke arah terwujudnya nilai-nilai tersebut

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), 51 - 55.

dalam diri individu dan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah :<sup>14</sup>

1. Menciptakan suasana yang kondusif bagi tegaknya rumah tangga yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan moral bagi generasi baru. Islam sudah memberikan cetak biru dengan memperkuat kasih sayang, kerjasama dan bantu membantu diantara anggota keluarga (keluarga kecil atau besar), serta terciptanya lingkungan yang cocok untuk membesarkan anak.
2. Negara Islam harus berusaha menciptakan suatu sistem pendidikan yang dijiwai dengan semangat Islam sehingga melahirkan pemuda dan pemudi yang disinari dengan cita-cita Islami.
3. Negara Islam harus menagakkan nilai-nilai dan norma Islam berupa penegakan hukum (*Legal Enforcemen*) serta menghukum para pelanggar sedemikian rupa sehingga membuat jera bagi calon pelanggar berikutnya.

Dalam praktek kehidupan bermasyarakat, pemerintah sebagai pemimpin dan pelindung tidak jarang menghadapi berbagai benturan kepentingan individu, kelompok, ataupun organisasi. Benturan ini muncul sebagai akibat dari tidak adanya koordinasi yang berfungsi untuk mengharmonisasi berbagai kepentingan tersebut. Bahkan tidak sedikit ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan ekonomi, baik yang dilakukan oleh aparat birokrasi maupun masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan peranan pemerintah untuk mengatur, memperbaiki, dan

---

<sup>14</sup> Chapra, *Negara*, 30 - 31.

mengarahkan aktifitas berbagai kepentingan tersebut agar bisa mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.<sup>15</sup>

### **TUGAS BIROKRASI PEMERINTAHAN PADA FUNGSI ALOKASI**

Fungsi alokasi dilakukan oleh pemerintah karena adanya kegagalan sistem pasar (*market failure*) dalam menyediakan barang-barang publik. Barang-barang publik adalah barang-barang dan jasa-jasa yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang-barang publik karena manfaat barang tersebut tidak hanya dirasakan oleh pribadi tetapi dinikmati oleh orang lain. Begitu barang tersebut dapat dinikmati oleh semua orang, maka tidak ada seorangpun yang bersedia untuk membayar biaya penyediaan barang tersebut.

Individu-individu, perusahaan-perusahaan, dan masyarakat tidak banyak yang bersedia dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengorbankan potensinya dalam rangka menyediakan barang-barang publik. Disamping tidak mendapatkan keuntungan secara langsung sebagaimana pada transaksi jual beli, juga penyediaannya tidak hanya dinikmati oleh dirinya saja. Masyarakat dari kalangan manapun dapat menggunakan dan menikmati atas barang-barang publik tersebut. Oleh karenanya, pemerintah

---

<sup>15</sup> Taquuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), 48.

berperan besar dalam menyediakan kebutuhan terhadap barang-barang publik ini.

Ketidakmampuan sistem ekonomi pasar dalam menyediakan barang-barang publik menjadikan sistem ini melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan, meskipun tetap dalam kerangka madhhab kapitalisme. Dalam permasalahan ini, madhhab ekonomi Islam telah memberikan jalan dengan petunjuk-petunjuk ajaran Islam yang ditujukan baik kepada individu, masyarakat, maupun pemerintahan.

Pemerintahan dalam sistem ekonomi Islam memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini adalah konsep ataupun pendapat yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi Islam tentang tugas pelayanan kepada masyarakat yang harus dilakukan oleh pemerintahan khususnya pada fungsi alokasi :

#### 1. Muhammad al-Assad

Pada zaman modern, campur tangan Negara dalam kegiatan ekonomi meningkat sampai batas negara menyelenggarakan rencana yang mencakup kegiatan ekonomi di negara tersebut. Perencanaan ekonomi maksudnya adalah bahwa negara dengan alat-alatnya yang khusus, menentukan rencana pertumbuhan ekonomi sampai batas masa tertentu, misalnya lima atau sepuluh tahun. Rencana ini membatasi target perekonomian selama periode tersebut, dengan memanfaatkan tenaga manusia

dan material yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan.<sup>16</sup>

## 2. Ibnu Hazm

Ibnu Hazm dalam bukunya *Al-Mahalla* menguraikan hak-hak muslim atas Pemerintah, yakni :<sup>17</sup>

- a. Setiap muslim berhak mendapatkan kebutuhan hidup, air, dan pakaian. Pemerintah jangan sampai membiarkan kaum muslimin kelaparan, sementara orang-orang non muslim lebih kaya dan hidup serba mewah.
- b. Umat muslim berhak mendapatkan pendidikan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah mengadakan dan mengatur pendidikan rakyatnya. Pemerintah bertanggungjawab mengadakan lowongan pekerjaan untuk rakyatnya karena mereka memang berhak.
- c. Sudah menjadi tanggungjawab pemerintah melindungi kehidupan, harta milik, harkat, dan martabat kaum muslimin.
- d. Pemerintah bertanggungjawab mengadakan dan mengatur pengangkutan (transportasi) dan melindungi keamanan perjalanan setiap warga negaranya.

## 3. Yusuf Qardhawi

Sangat mustahil suatu bangsa dikatakan bangsa yang kuat bila senjata yang dimilikinya adalah produk impor. Demikian pula, suatu negara dipastikan akan lemah jika

---

<sup>16</sup> Ahmad Muhammad Al Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saepudin (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 107 - 108.

<sup>17</sup> Saud, *Garis-Garis*, 89.

aspek intelektualnya bersandar pada orang-orang asing khususnya dalam urusan-urusan yang peka dan bersifat rahasia. Tidak mungkin ada kedaulatan yang penuh bila ia tidak berkuasa mengatur urusan dalam negerinya sendiri dan tidak mampu menyediakan obat untuk rakyatnya, penyediaan alat-alat senjata dan alat-alat berat, penyediaan bahan makanan kecuali dengan mengimpor. Terakhir, bagaimana mungkin suatu bangsa dikatakan makmur, jika ia tidak memiliki sarana informasi untuk menyampaikan misinya, kecuali dengan menyewa atau meminjam dari negeri tetangga ? Selama sebuah negara tidak memiliki percetakan, kantor berita, dan satelit pemancar sendiri, maka sulit untuk tidak mengatakan negara itu adalah negara yang terbelakang.<sup>18</sup>

#### 4. Izzudin Al Khatib At Tamimi

Semua itu demi meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan individu. Dalam konteks ini, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :<sup>19</sup>

- a. Kewajiban negara untuk lebih memperhatikan soal kemakmuran tanah ketimbang perhatiannya menarik pajak.
- b. Jika negara melakukan hal yang sebaliknya, maka tak pelak hal itu akan mendatangkan hasil negatif yang justru tidak diinginkan oleh semua. Boleh jadi para petani akan sangat enggan melakukan pekerjaannya, sehingga banyak timbul pengangguran, kekacauan, dan

---

<sup>18</sup> Qardhawi, *Norma*, 129.

<sup>19</sup> Izzudin Al-Khatib At Tamimi, *Nilai Kerja Dalam Islam*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq (Solo : Pustaka Mantiq, 1993), 61 - 62.

kerusakan yang melanda di setiap tempat. Dengan demikian keadaan sosial akan kacau semua.

- c. Harus ada hubungan yang erat antara orang-orang yang bergerak di bidang pertanian dengan mereka yang bergerak di bidang industri, perdagangan dan sebagainya, demi terwujudnya kepentingan bersama.
  - d. Memberikan biaya baik berupa pinjaman lunak atau bantuan kepada para petani apabila mereka memang membutuhkannya. Pemerintah tidak boleh kikir dalam masalah ini.
  - e. Sistem ini merupakan sistem yang efektif sekali bagi terciptanya keberhasilan negara dalam menunaikan tugas-tugasnya untuk berkhidmat kepada masyarakat secara luas.
5. Nik Mustofa

Masyarakat dan penguasa dalam sistem ekonomi Islam berkewajiban untuk menjamin bahwa semua kebutuhan pokok individu terpenuhi. Efisiensi dan produktifitas ekonomi tidak akan tercapai jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan pokok bagi seluruh penduduk merupakan prasyarat bagi pencapaian stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.<sup>20</sup>

6. Syed Nawab Haider Naqvi

Pada pokoknya, negara kesejahteraan berlandaskan pada diktum : "Dari setiap orang menurut kemampuannya dan

---

<sup>20</sup> Nik Mustapha, *Prinsip-prinsip Sistem Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek Ekonomi*, Ed. M. Rusli Karim (Yogyakarta : P3EI FE UII dan Tiara Wacana Yogya, 1992), 24- 25.

kepada setiap orang menurut kebutuhannya.” Yang dilakukan menurut aturan ini adalah memisahkan kemampuan individu untuk mendapatkan nafkah hidup minimum dari gelar tiap-tiap individu dalam masyarakat. Untuk persyaratan tersebut di atas, ajaran negara kesejahteraan menetapkan penciptaan pranata yang memberikan jaminan untuk memenuhi kedua aturan dasar ini :<sup>21</sup>

- a. Produksi harus diperluas ke berbagai sektor ekonomi untuk menyamakan produktivitas marginal di antara mereka.
- b. Distribusi pendapatan di antara semua konsumen harus dilakukan untuk menyamakan kegunaan konsumsi marginal mereka.

### **TUGAS BIROKRASI PEMERINTAHAN PADA FUNGSI DISTRIBUSI**

Fungsi distribusi ini dilakukan oleh pemerintah karena munculnya penyebaran pendapatan dan kekayaan oleh sistem pasar yang dianggap tidak adil oleh masyarakat. Dalam ilmu ekonomi masalah distribusi pendapatan dan kekayaan ini merupakan masalah yang rumit, karena hampir tidak ada perbaikan keadaan suatu golongan atau kelompok yang tidak berpengaruh baik atau buruk terhadap golongan atau kelompok yang lainnya. Masalah keadilan dalam distribusi ini sangat tergantung dari persepsi masyarakat itu sendiri. Masyarakatlah yang menentukan model atau format

---

<sup>21</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami* (Jakarta : Mizan, 1993), 117 - 118.

keadilan sehingga pemerintah melalui kebijakannya tinggal melaksanakan distribusi pendapatan dan kekayaan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri.

Sistem pasar tidak dapat mengendalikan setiap individu yang dalam kegiatan ekonominya memperoleh pendapatan dan kekayaan yang semakin lama semakin besar. Sedangkan terdapat keadaan individu lainnya yang dalam kegiatan ekonominya memperoleh pendapatan dan kekayaan yang semakin lama semakin kecil. Keadaan seperti ini akan berdampak buruk secara ekonomi dan sosial bagi individu itu sendiri maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya dalam ekonomi Islam, melalui pemerintah telah dilakukan berbagai penataan terhadap individu dan masyarakat agar pendapatan dan kekayaan ini tidak menjadi pemicu konflik ekonomi dan sosial tetapi justru menjadi dorongan untuk semakin maju dan berkembang.

Pemerintahan dalam sistem ekonomi Islam memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rangka menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan ini agar berlangsung dengan baik dan benar, tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial. Berikut ini adalah konsep ataupun pendapat yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi Islam tentang tugas yang harus dilakukan oleh pemerintahan khususnya pada fungsi distribusi :

#### 1. Sayyid Qutb

Dalam harta masih ada kewajiban selain zakat. Maka jika diperlukan keuangan untuk pembangunan negara dan

kemaslahatan bangsa, pemerintah boleh menetapkan kewajiban membayar pajak, dan sebagainya.<sup>22</sup>

## 2. Khursyid Ahmad

Berdasarkan kondisi ketimpangan internasional dan labilnya pasar, maka negara Islam, organisasi dan lembaga Islam lainnya turut serta secara aktif mencapai tujuan khusus. Untuk sementara pemerintah tidak akan mampu mengemban tugas ini, tidak seperti pribadi-pribadi. Akan tetapi akan lebih mudah bagi pemerintah untuk mengatasi kelemahan ini sekaligus meluruskan situasi yang benar. Karena salah satu tujuan pembangunan adalah melalui desentralisasi, pemerintah daerah perlu diberikan keluasaan untuk mengembangkan daerahnya sendiri dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Dengan terus melakukan *checks and balances* serta bimbingan dan pengawasan yang kuat, maka pemerintah akan membentuk daerah itu menjadi agen pembangunan yang serba guna.<sup>23</sup>

## 3. Amim Akhtar

Negara Islam hakikatnya adalah negara kesejahteraan yang demokratis (*democratic welfare state*) yang didasarkan pada landasan moral dan sangat memperhatikan kesejahteraan moral dan material masyarakatnya. Sistem Ekonomi Islam (SEI) ini memiliki tujuan asasi menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kesejahteraan ekonomi, keadilan

---

<sup>22</sup> Saifuddin Mujtaba, *Belanjakan Harta Anda Sesuai Amanat Allah* (HI. Press, 1997), 51.

<sup>23</sup> Khurshid Ahmad, *Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam dalam Etika Ekonomi Politik, Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Ed. Aunur R. Sophiaan (Surabaya, Risalah Gusti, 197), 20 - 21.

sosial dan ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata dalam kerangka kesejahteraan sosial.<sup>24</sup>

#### 4. Mawardi

Salah satu tugas dan fungsi negara adalah mendistribusikan keadilan dan melaksanakan semua *litigasi* (hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelidikan hukum) sesuai dengan syariah, yaitu : Hukum Ilahi. Dia harus menjauhkan yang kuat untuk eksploitasi yang lemah dan membantu dari yang lemah dalam mendapatkan dari yang kuat. Membagikan tunjangan dan kompensasi yang diambilkan dari kas negara kepada mereka yang berhak atasnya.<sup>25</sup>

#### 5. Taqyuddin An-Nabhani

Apabila masyarakat mengalami kesenjangan yang lebar antar individu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, lalu ingin dibangun kembali masyarakat, atau di dalam masyarakat tersebut terjadi kesenjangan karena mengabaikan hukum-hukum Islam, serta meremehkan penerapan hukum-hukum tersebut, maka negara harus memecahkannya dengan cara mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat, dengan cara memberikan harta negara yang menjadi hak miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu negara bisa mencukupinya, sehingga dengan terjadinya pemenuhan

---

<sup>24</sup> Amim Akhtar, *Kerangka Kerja Struktural Sitem Ekonomi Islam dalam Etika Ekonomi Politik, Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Ed. Aunur R. Sophiaan (Surabaya, Risalah Gusti, 197), 88.

<sup>25</sup> Muhammad Muslehudin, *Wacana Baru, Manajemen dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta : IRCiSoD, 2004), 62 - 63.

tersebut akan terwujud keseimbangan (*equilibrium*) dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.<sup>26</sup>

## **TUGAS BIROKRASI PEMERINTAHAN PADA FUNGSI ALOKASI STABILISASI**

Fungsi stabilisasi ini dilakukan oleh pemerintah karena bila perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada sistem pasar maka akan sangat peka terhadap guncangan keadaan. Kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan deflasi adalah penyakit-penyakit ekonomi yang hanya bisa dilakukan penyembuhannya oleh pemerintah.

Sistem ekonomi pasar akan berbahaya bila dibiarkan sendirian mengurus perekonomian masyarakat. Sistem ini tidak memberikan kenyamanan kepada pelaku-pelakunya. Oleh karenanya, pemerintah berkewajiban untuk turut campur dalam rangka memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa ketidakstabilan yang terjadi pada sistem ini dapat dikendalikan dan dikembalikan pada keadaan yang penuh dengan keseimbangan.

Pemerintahan dalam sistem ekonomi Islam memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rangka menjamin terjadinya stabilisasi pada kegiatan perekonomian. Masyarakat perlu mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan perlindungan dari guncangan ekonomi akibat ketidakstabilan yang muncul dalam sistem pasar ini. Berikut ini adalah konsep ataupun pendapat yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi Islam tentang tugas yang harus dilakukan oleh pemerintahan khususnya pada fungsi stabilisasi :

1. M. Umer Chapra

---

<sup>26</sup> An Nabhani, *Membangun*, 272 - 273.

Beberapa fungsi utama negara sejahtera Islami di bawah ini sama pentingnya, yakni : <sup>27</sup>

- a. Memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
- b. Meningkatkan stabilitas nilai riil uang
- c. Menjaga hukum dan ketertiban
- d. Menegakkan keadilan sosial ekonomi
- e. Mengatur keamanan masyarakat dan membagi pemerataan pendapatan dan kekayaan
- f. Menyelaraskan hubungan internasional dan pertahanan nasional

## 2. Ahmad M. Saepudin

Sistem ekonomi Islam dapat dilaksanakan lengkap untuk mencapai tujuan sistem, untuk itu memerlukan aransemen sistem penunjang yang harmonis dalam masyarakat karena sistem berkaitan dengan aspek sosial makro dari negara. Pelaksanaan zakat, pelarangan riba memerlukan aspek legal dari negara. Sistem ini dapat bekerja walau secara parsial. Bank Islam dapat *applicable* dan *viable* dalam masyarakat yang belum sepenuhnya melaksanakan syariah Islam, dan di pihak lain masyarakat yang melaksanakan kegiatan bank bebas bunga itu tidak berarti sudah menjadi masyarakat Islam. <sup>28</sup>

## 3. Sigit Purnawan Jati

Namun demikian, jika kondisi mengharuskan negara untuk mencetak uang demi menjaga perekonomian dan moneter negara dari kemerosotan, serta menghindarkan dominasi dan kendali negara asing maka mencetak uang hukumnya menjadi wajib bagi negara Islam. Tentu saja

---

<sup>27</sup> Chapra, *Negara*, 35.

<sup>28</sup> Saepudin, *Nilai-Nilai*, 37.

uang yang dikeluarkan oleh negara harus bersifat mandiri dan tidak boleh terikat dengan mata uang asing manapun. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu negara yang mata uangnya terikat dengan negara asing, seperti rupiah terikat dengan dollar AS akan senantiasa tunduk di bawah belas kasihan dan arahan dari (dikte) negara asing itu dalam kebijakan perekonomiannya.<sup>29</sup>

#### 4. Ibnu Taimiyah

Beliau menyarankan agar negara atau pemerintahan Islam harus dapat merealisasikan program menghilangkan kemiskinan, regulasi pasar, kebijakan moneter, perencanaan ekonomi. Aktivitas ini dilakukan sehingga siklus ekonomi dapat berjalan dengan baik, dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Kemiskinan dapat menjurus kepada kekafiran.<sup>30</sup>

#### 5. M. Faruq an-Nabahan

Islam berpandangan bahwa pemerintah harus bertanggungjawab atas keadilan sosial. Keadilan harus dipahami sebagai doktrin syariah. Sebab syariah tidak hadir, kecuali demi menciptakan keadilan sosial. Dan kalau di al-Qur'an menekankan keadilan dan kemudian diiringi dengan menekankan kebaikan, itu tak lain adalah demi penciptaan keadilan dan demi mewujudkan kebaikan. Ini berarti pula dalam menciptakan keadilan, mesti dibarengi dengan kebaikan. Keadilan tidak akan lahir, kecuali dengan kestabilan kondisi, dimana hak dan kewajiban masyarakat terjamin secara seimbang. Jika

---

<sup>29</sup> Sigit Purnawan Jati, *Seputar Dinar dan Dirham dalam Dinar Emas dan Solusi Krisis Moneter* (Jakarta : PIRAC, SEM Institute, dan Infid, 2001),134 - 135.

<sup>30</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta : Salemba Empat, 2002), 202.

antara anggota masyarakat sudah saling khianat, maka bubarlah keadilan dan akan sirna.<sup>31</sup>

#### 6. MA. Mannan

Negara Islam modern harus menerima konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan defisit anggaran. Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan, dan mencari jalan serta cara-cara untuk mencapainya, baik dengan rasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil kredit dari sistem perbankan dari luar negeri.<sup>32</sup>

### **PENUTUP**

Ekonomi Islam memandang bahwa fungsi alokasi merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa yang bersifat publik, kurang atau tidak mampu disediakan oleh pasar, dan tidak diminati oleh produsen tetapi dibutuhkan oleh masyarakat. Tindakan hukum dan tindakan ekonomi pemerintah sangat diperlukan dalam rangka mencapai cita-cita ekonomi Islam yang berwujud pada keadaan keseimbangan pasar yang adil dan makmur, terpenuhinya hak-hak khilafah, dan kepatuhan kepada Allah Swt. Pada pelaksanaannya, pemerintah berkewajiban melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang melibatkan sumberdaya yang ada secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki hingga memastikan terwujudnya tujuan akhir secara lebih optimal.

Ekonomi Islam memandang bahwa fungsi distribusi merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka untuk

---

<sup>31</sup> M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam, Pilihan Setelah Kegagalan Kapitalis dan Sosialis*, terj. Muhadi Zainudin dan A. Bahaudin Nursalim (Yogyakarta : UII Press, 2000), 68.

<sup>32</sup> Mannan, *Ekonomi*, 236.

menciptakan pembagian pendapatan dan kekayaan yang mencerminkan keadilan distributif. Keadilan ini bukanlah mengharuskan adanya kesamaan tetapi tetap harus mempertimbangkan kontribusinya kepada masyarakat agar tercapai keadaan kemandirian. Pada pelaksanaannya, pemerintah bersama-sama dengan elemen masyarakat yang lainnya berkewajiban merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kebijakan distribusi pendapatan dan kekayaan ini hingga terwujud perimbangan ekonomi di antara individu-individu dalam masyarakat.

Ekonomi Islam memandang bahwa fungsi stabilisasi merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan kepastian, kenyamanan, dan ketenangan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pada pelaksanaannya Pemerintah berkewajiban mempertahankan berjalannya hukum dan ketertiban, menjaga stabilitas moneter, mengurangi pengangguran, memberantas kemiskinan, menciptakan iklim usaha, mengawasi harga, membentuk lembaga pengawas, memperbaiki anggaran, dan membuat kebijakan yang mendukung terciptanya stabilisasi perekonomian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Khurshid. *Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam* dalam Etika Ekonomi Politik, Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam, Ed. Aunur R. Sophiaan. Surabaya, Risalah Gusti, 197.
- Akhtar, Amim. *Kerangka Kerja Struktural Sitem Ekonomi Islam* dalam Etika Ekonomi Politik, Elemen-Elemen Strategis

- Pembangunan Masyarakat Islam, Ed. Aunur R. Sophiaan. Surabaya, Risalah Gusti, 197.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad. dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saepudin. Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Baswir, Revrisond. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan IDEA, 1997.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Hamidi, M. Lutfi. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta : Senayan Abadi Publising, 2003.
- Hafidudin, Didin. dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press, 2003).
- Jati, Sigit Purnawan. *Seputar Dinar dan Dirham dalam Dinar Emas dan Solusi Krisis Moneter*. Jakarta : PIRAC, SEM Institute, dan Infid, 2001.
- Al-Maududi, Abul A'la. *Masalah Ekonomi dan Pemecahannya Menurut Islam*, terj. Adnam Syamni. Jakarta : Media Dakwah, 1985.
- Mustapha, Nik. *Prinsip-prinsip Sistem Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek Ekonomi*, Ed. M. Rusli Karim. Yogyakarta : P3EI FE UII dan Tiara Wacana Yogya, 1992.
- Mujtaba, Saifuddin. *Belanjakan Harta Anda Sesuai Amanat Allah*. HI. Press, 1997.
- Muslehudin, Muhammad. *Wacana Baru, Manajemen dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta : IRCiSoD, 2004.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta : Salemba Empat, 2002.
- An-Nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam, Pilihan Setelah Kegagalan Kapitalis dan Sosialis*, terj. Muhadi Zainudin

- dan A. Bahaudin Nursalim. Yogyakarta : UII Press, 2000.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. Jakarta : Mizan, 1993.
- Saud, Mahmud Abu. *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, terj. Achmad Rais. Jakarta : Gema Insani Press, 1991.
- Saepudin, Ahmad M. *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta : CV. Samudra, 1984.
- At Tamimi, Izzudin Al Khatib. *Nilai Kerja Dalam Islam*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq. Solo : Pustaka Mantiq, 1993.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta : Gema Insani Press, 1997.